

DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA PASCA-REFORMASI : PERSPEKTIF GENERASI Z TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI ERA DIGITAL

Linda Tasya Fardhani Gulo¹, Icha Karina², Nayla Azzahra Siregar³, Alya Aida Munira Siregar⁴, Luqman Abdurrahman Wahidin⁵, Aminuddin⁶

⁶Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ichakarina94@gmail.com¹, lindatasyafardhani@gmail.com²,

naeyllazahraa@gmail.com³, alyaaidamunira@gmail.com⁴, luqman.aw05@gmail.com⁵,

aminuddin@uinsu.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah masa reformasi membawa perubahan besar dalam kehidupan politik masyarakat. Kemajuan teknologi dan hadirnya media digital turut memengaruhi cara generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam memahami dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang dekat dengan internet dan media sosial sehingga lebih mudah memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mengikuti isu-isu politik yang sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Generasi Z terhadap partisipasi politik di era digital dalam dinamika demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan demokrasi dan partisipasi politik generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital memberikan ruang yang luas bagi Generasi Z untuk terlibat dalam aktivitas politik, baik melalui diskusi di media sosial, kampanye digital, maupun penyampaian aspirasi secara online. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, perbedaan pandangan politik yang tajam, dan rendahnya minat sebagian anak muda terhadap politik. Dengan demikian, diperlukan pemahaman politik dan literasi digital yang baik agar Generasi Z dapat berpartisipasi secara bijak serta mendukung perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Reformasi, Generasi Z, Partisipasi Politik, Media Digital

Abstract

The development of democracy in Indonesia after the reform era has brought major changes to the political life of society. Technological advances and the presence of digital media have also influenced the way young people, especially Generation Z, understand and participate in political activities. Generation Z is known as a generation that is closely connected to the internet and social media, making it easier for them to obtain information, express opinions, and follow

current political issues. This study aims to determine the perspective of Generation Z toward political participation in the digital era within the dynamics of Indonesia's post-reform democracy. The research method used is a literature study with a qualitative approach through various sources such as books, journals, and scientific articles related to democracy and youth political participation. The results show that digital media provides broad opportunities for Generation Z to engage in political activities, both through discussions on social media, digital campaigns, and online expression of aspirations. On the other hand, these developments also create challenges such as the spread of false information, sharp political differences, and the low interest of some young people in politics. Therefore, political understanding and digital literacy are needed so that Generation Z can participate wisely and support the development of a healthier and more democratic Indonesian democracy.

Keywords: Nationalism, Identity, Inclusiveness

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan negara (Budiardjo, 2015). Di Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kemerdekaan hingga memasuki era reformasi. Reformasi tahun 1998 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena membawa perubahan besar dalam sistem politik, pemerintahan, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sejak masa tersebut, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang semakin terbuka dan memberi peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Perkembangan demokrasi setelah reformasi terlihat dari meningkatnya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, serta bertambahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi lembaga pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pola partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. Kehadiran teknologi informasi dan media digital semakin mempercepat arus komunikasi politik sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat melalui berbagai platform digital.

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kehidupan mereka sangat dekat dengan internet, media sosial, serta berbagai bentuk komunikasi berbasis digital lainnya. Kondisi tersebut membuat Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam memahami persoalan sosial dan politik. Media digital tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang diskusi, penyebaran informasi, hingga media untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik Generasi Z dapat dilihat melalui berbagai aktivitas seperti mengikuti diskusi politik di media sosial, menyampaikan opini, mengikuti kampanye digital, hingga ikut dalam gerakan sosial. Kehadiran media digital memberikan peluang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif tanpa harus selalu terlibat dalam

kegiatan politik konvensional. Dengan demikian, perkembangan teknologi telah mengubah pola partisipasi politik masyarakat menjadi lebih modern dan terbuka.

Meskipun demikian, perkembangan partisipasi politik di era digital juga menghadirkan sejumlah tantangan. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta polarisasi politik di media sosial menjadi persoalan yang sering muncul dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Selain itu, tidak semua informasi politik yang beredar di media digital memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda dalam memahami demokrasi serta menentukan sikap politik mereka.

Di sisi lain, rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman politik juga dapat menyebabkan munculnya sikap apatis di kalangan Generasi Z terhadap kehidupan politik. Sebagian generasi muda cenderung hanya mengikuti informasi yang sedang viral tanpa memahami substansi persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis serta kemampuan memilah informasi agar partisipasi politik yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia (Moleong, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembahasan mengenai dinamika demokrasi Indonesia pasca-reformasi dari sudut pandang Generasi Z menjadi hal yang penting untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk partisipasi politik Generasi Z di era digital sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan demokrasi modern. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda yang lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi

Setelah Reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Peristiwa tersebut dipicu oleh krisis ekonomi, aksi demonstrasi mahasiswa, serta tuntutan masyarakat terhadap perubahan politik. Setelah itu, pemerintah mulai membuka ruang demokrasi yang sebelumnya sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak politik masyarakat mulai diakui secara lebih luas. Reformasi menjadi awal lahirnya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis di Indonesia (Noer, 2016).

Pada masa pemerintahan B. J. Habibie, berbagai kebijakan reformasi mulai dijalankan untuk memperbaiki kehidupan politik nasional.¹ Pemerintah menghapus pembatasan terhadap media massa dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Pemilu tahun 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah berakhirnya Orde Baru dan diikuti oleh banyak partai politik. Melalui pemilu tersebut, masyarakat dapat menentukan wakil rakyat secara lebih bebas dan terbuka. Reformasi politik ini juga

DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA PASCA-REFORMASI : PERSPEKTIF GENERASI Z TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI ERA DIGITAL

mendorong munculnya budaya kritik terhadap pemerintah yang sebelumnya sulit dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan penting lainnya terjadi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut bertujuan memperbaiki sistem ketatanegaraan agar kekuasaan tidak terpusat pada presiden. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk memperkuat pengawasan hukum. Kedudukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga dibuat lebih seimbang. Perubahan konstitusi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

Dalam bidang pemerintahan daerah, Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengatur daerah masing-masing. Tujuan utama otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sistem tersebut membuat masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya. Walaupun demikian, praktik korupsi dan politik uang di beberapa daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi lokal (Nasrullah, 2017).

Perkembangan demokrasi juga terlihat dari semakin bebasnya pers dan media massa setelah Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah sering melakukan pembredelan terhadap media yang dianggap mengkritik kekuasaan. Setelah reformasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tanpa pengawasan ketat pemerintah. Kehadiran internet dan media sosial semakin memperluas ruang kebebasan berpendapat di tengah masyarakat. Media digital kini digunakan untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan informasi politik secara cepat. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan masalah baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berita yang tidak benar.

Di era digital saat ini, generasi muda terutama Generasi Z memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Generasi Z dikenal aktif menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan politik dan isu sosial. Mereka sering menyampaikan pendapat melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X. Partisipasi politik generasi muda terlihat dalam kampanye sosial, diskusi publik, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran politik di kalangan anak muda meningkat karena informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Walaupun begitu, rendahnya literasi digital terkadang membuat sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia pasca-reformasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pemilu yang dilaksanakan secara rutin membuktikan bahwa sistem demokrasi tetap berjalan hingga sekarang. Kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan memilih pemimpin menjadi salah satu pencapaian penting

Reformasi 1998. Di sisi lain, masalah korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial masih sering terjadi dalam kehidupan politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Partisipasi aktif warga negara, terutama generasi muda, akan sangat menentukan masa depan demokrasi di Indonesia.

Karakteristik Generasi Z dalam Politik

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital dan internet sejak awal tahun 2000-an. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X membuat ruang politik menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh anak muda. Informasi politik kini dapat tersebar hanya dalam hitungan detik melalui video pendek maupun unggahan digital lainnya. Dalam berbagai peristiwa politik, penggunaan tagar atau hashtag sering menjadi awal munculnya gerakan sosial di masyarakat. Anak muda juga mulai memanfaatkan fitur siaran langsung, polling, dan kolom komentar sebagai ruang diskusi politik. Selain itu, meme dan video satir sering digunakan sebagai bentuk kritik politik yang lebih ringan tetapi tetap memiliki makna sosial yang kuat.

Rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik tradisional juga menjadi salah satu karakteristik Generasi Z di era modern. Banyak anak muda menganggap partai politik sering terlibat dalam praktik korupsi dan lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Kondisi tersebut membuat sebagian generasi muda lebih memilih mendukung gerakan sosial independen dan organisasi masyarakat sipil. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses pembuatan kebijakan serta penggunaan dana politik oleh pemerintah. Gaya pidato politik yang terlalu formal dan penuh janji mulai dianggap kurang relevan bagi kalangan muda. Oleh sebab itu, muncul dorongan dari masyarakat agar sistem politik dan birokrasi menjadi lebih terbuka serta mudah diawasi publik.

Generasi Z juga dikenal memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka cenderung menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya di tengah masyarakat. Pengaruh globalisasi dan perkembangan internet membuat pola pikir generasi muda menjadi lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Anak muda lebih mudah bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memperjuangkan isu tertentu secara bersama-sama. Sikap diskriminatif dan tindakan rasisme biasanya mendapatkan penolakan keras di media sosial. Dalam banyak kasus, empati terhadap kelompok yang tertindas menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan sikap politik mereka (Bungin, 2015).

Perkembangan demokrasi digital pasca-Reformasi 1998 juga mendorong lahirnya politik partisipatif di kalangan Generasi Z. Anak muda tidak hanya aktif memberikan komentar di media sosial, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi sosial dan gerakan masyarakat. Penggalangan dana secara daring atau crowdfunding mulai sering dilakukan untuk membantu korban ketidakadilan maupun bencana sosial. Selain itu, petisi online digunakan sebagai sarana untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Demonstrasi mahasiswa tahun 2019 menjadi salah satu contoh gerakan politik yang banyak digerakkan melalui media sosial. Peristiwa tersebut menunjukkan

DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA PASCA-REFORMASI : PERSPEKTIF GENERASI Z TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI ERA DIGITAL

bahwa ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan politik modern di Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi digital, Generasi Z dikenal lebih cepat dalam mendeteksi berita bohong atau hoaks politik. Mereka terbiasa melakukan pemeriksaan fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi di media sosial. Kemampuan tersebut berkembang karena anak muda hidup di lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi dan internet. Generasi muda juga mulai memanfaatkan situs pemeriksa fakta untuk memastikan kebenaran foto, video, maupun berita politik yang sedang viral. Sikap skeptis terhadap media dan akun buzzer politik semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak sedikit pula anak muda yang membantu memberikan edukasi digital kepada keluarga dan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh berita palsu.

Dalam melihat persoalan politik, Generasi Z lebih menyukai pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pada solusi nyata. Mereka lebih tertarik pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik, peluang kerja, pendidikan, dan kestabilan ekonomi menjadi perhatian utama generasi muda saat ini. Perdebatan politik yang hanya menimbulkan konflik tanpa solusi biasanya dianggap tidak memberikan manfaat bagi masa depan. Generasi Z juga lebih sering menggunakan data, infografis, dan hasil riset untuk memperkuat pendapat mereka dalam diskusi politik. Oleh karena itu, kehadiran generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia di era digital sekarang ini.

Pengaruh Era Digital terhadap Partisipasi Politik

Perkembangan teknologi informasi sejak awal tahun 2000-an membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat terlibat dalam kehidupan politik. Kehadiran internet membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Setelah Reformasi 1998, kebebasan dalam menyampaikan pendapat mulai memperoleh ruang yang lebih luas di Indonesia. Akses internet yang semakin merata membuat masyarakat dapat mengikuti perkembangan politik secara cepat dan mudah. Informasi mengenai kebijakan pemerintah kini dapat diperoleh langsung melalui media digital tanpa batas wilayah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia.

Media sosial kemudian berkembang menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik politik. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X mulai ramai digunakan masyarakat Indonesia terutama sejak tahun 2010-an. Diskusi politik yang sebelumnya banyak berlangsung di televisi atau forum formal kini berpindah ke ruang digital. Masyarakat dapat memberikan komentar secara langsung terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih terbuka karena informasi menyebar sangat cepat. Kehadiran media sosial akhirnya menjadikan partisipasi politik masyarakat semakin luas di era digital.

Perkembangan teknologi juga mendorong lahirnya berbagai gerakan sosial dan politik berbasis digital di tengah masyarakat. Penggalangan dana

secara daring atau crowdfunding mulai sering dimanfaatkan untuk membantu korban ketidakadilan sosial maupun bencana. Selain itu, petisi online menjadi sarana baru dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Penyebaran poster digital dan infografis membuat isu politik yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Gerakan mahasiswa tahun 2019 menjadi salah satu contoh aksi yang banyak berkembang melalui media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan politik modern di Indonesia.

Di balik berbagai kemudahan yang diberikan teknologi digital, muncul pula tantangan baru berupa penyebaran hoaks politik. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan memengaruhi opini masyarakat. Dalam beberapa pemilu terakhir, penyebaran berita bohong sering menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Polarisasi politik semakin terlihat akibat munculnya narasi kebencian dan saling menyerang antar kelompok pendukung. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya lebih mudah terpengaruh emosi dibandingkan memahami fakta secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi perkembangan demokrasi di era digital saat ini (Nasrullah, 2017).

Generasi muda terutama Generasi Z memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan politik digital di Indonesia. Mereka lebih aktif menggunakan media sosial untuk mengikuti isu sosial, politik, dan kebijakan pemerintah. Konten politik yang dikemas secara kreatif melalui video pendek dan meme lebih mudah menarik perhatian pemilih muda. Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, keterlibatan pemilih muda terlihat meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Anak muda cenderung lebih tertarik melihat rekam jejak tokoh politik melalui media digital daripada membaca kampanye konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi politik terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Pemerintah juga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui digitalisasi pelayanan publik. ¹Berbagai layanan administrasi kini dapat diakses secara daring untuk mempermudah masyarakat. Transparansi anggaran dan laporan pemerintahan mulai dipublikasikan melalui situs resmi agar dapat diawasi publik. Selain itu, saluran pengaduan online membantu masyarakat menyampaikan laporan terkait pelayanan publik maupun tindak korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mulai membahas kemungkinan penggunaan sistem pemilu elektronik secara lebih luas. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mulai menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

Perkembangan demokrasi di masa depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak. Literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun propaganda politik di internet. Selain itu, perlindungan data pribadi juga perlu diperkuat untuk menjaga keamanan ruang digital masyarakat. Jika digunakan dengan baik, teknologi dapat memperluas partisipasi politik dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun, penggunaan media digital tanpa pengawasan dapat memicu konflik sosial dan merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat

dibutuhkan untuk menjaga demokrasi Indonesia di era digital tetap berjalan dengan baik (Indrajit, 2016).

Tantangan dan Dampak Partisipasi Politik Generasi Z di Era Digital

Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar terhadap pola partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Generasi Z tumbuh di tengah perkembangan internet dan media sosial yang sangat pesat sejak awal tahun 2000-an. Kehadiran platform digital membuat anak muda lebih mudah menyampaikan pendapat mengenai isu sosial maupun politik. Ruang digital juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung. Aktivitas politik yang dahulu lebih banyak dilakukan melalui organisasi kini mulai berpindah ke media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi cara generasi muda berpartisipasi dalam demokrasi.

Arus informasi yang sangat cepat di media sosial menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Generasi Z saat ini. Informasi politik dapat tersebar dalam waktu singkat tanpa melalui proses pemeriksaan yang jelas. Dalam beberapa pemilu terakhir di Indonesia, penyebaran hoaks sering memicu perdebatan dan perpecahan di tengah masyarakat. Anak muda yang kurang memiliki kemampuan literasi digital menjadi lebih mudah terpengaruh oleh berita palsu. Selain itu, algoritma media sosial sering menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan pengguna sehingga mempersempit sudut pandang mereka. Oleh sebab itu, kemampuan memeriksa fakta menjadi hal penting dalam menghadapi perkembangan politik digital.

Selain hoaks, tantangan lain yang dihadapi Generasi Z adalah tingginya kasus perundungan atau cyberbullying di media sosial. Banyak anak muda merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir mendapatkan komentar negatif dari pengguna lain. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap isu politik sering dibalas dengan hinaan maupun serangan pribadi. Fenomena cancel culture juga membuat sebagian masyarakat memilih diam agar tidak menjadi sasaran kecaman publik. Kondisi tersebut dapat mengurangi kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam demokrasi¹. Akibatnya, ruang digital yang awalnya terbuka justru berubah menjadi lingkungan yang penuh tekanan sosial.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, media sosial tetap memberikan dampak positif terhadap perkembangan partisipasi politik generasi muda. Platform digital mempermudah masyarakat dalam menyebarkan informasi dan mengajak orang lain terlibat dalam gerakan sosial. Penggalangan dana daring, kampanye kemanusiaan, dan petisi online kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan luas. Gerakan berbasis tagar juga sering digunakan untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah maupun menyuarakan isu tertentu. Dalam beberapa peristiwa nasional, media sosial terbukti mampu menggerakkan solidaritas masyarakat dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan sosial modern.

Perkembangan media digital membuat gaya komunikasi politik mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Generasi Z cenderung lebih tertarik pada penyampaian informasi yang singkat, visual, dan

mudah dipahami. Konten politik melalui video pendek di TikTok maupun Instagram lebih cepat menarik perhatian dibandingkan pidato panjang yang formal. Kondisi tersebut membuat politisi dan lembaga pemerintah mulai menyesuaikan cara komunikasi mereka kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang kreatif dianggap lebih efektif dalam menarik perhatian pemilih muda. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi ikut mengubah pola komunikasi politik di era modern.

Di sisi lain, perkembangan media sosial juga melahirkan fenomena aktivisme semu atau slactivism di kalangan generasi muda. Sebagian masyarakat merasa telah ikut berpartisipasi dalam politik hanya dengan memberikan tanda suka atau membagikan unggahan tertentu. Padahal, keterlibatan tersebut sering kali tidak diikuti dengan tindakan nyata di lingkungan sosial maupun politik. Tingkat partisipasi dalam pemilu dan kegiatan sosial secara langsung masih menjadi perhatian dalam kehidupan demokrasi saat ini. Kepedulian digital memang penting, tetapi tetap memerlukan tindakan konkret agar dapat memberikan dampak nyata. Tanpa aksi langsung, partisipasi politik di media sosial hanya akan menjadi tren sementara di kalangan anak muda (Kurnia, 2019).

Pada akhirnya, perkembangan demokrasi di era digital sangat dipengaruhi oleh peran Generasi Z dalam menggunakan teknologi secara bijak. Media sosial dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, ancaman hoaks, cyberbullying, dan manipulasi informasi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Literasi digital dan kesadaran politik menjadi kunci agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat membantu menciptakan partisipasi politik yang lebih terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, Generasi Z memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan berpendapat yang dahulu cukup terbatas kini menjadi lebih terbuka, terutama sejak perkembangan internet dan media sosial semakin pesat. Masyarakat dapat mengikuti berbagai informasi politik dengan lebih mudah dan cepat melalui ruang digital. Dalam situasi tersebut, Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang aktif menyampaikan pendapat dan ikut membahas isu-isu politik yang sedang berkembang. Kehadiran teknologi akhirnya membuat pola partisipasi politik ikut berubah mengikuti perkembangan zaman. Politik tidak lagi hanya dibahas di ruang formal, tetapi juga hadir dalam kehidupan digital sehari-hari. Generasi Z memiliki cara pandang yang berbeda terhadap politik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih dekat dengan media sosial, lebih cepat menerima informasi, dan lebih berani menyampaikan pendapat di ruang publik. Berbagai isu seperti pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan hak sosial sering menjadi perhatian utama generasi muda saat ini. Namun, perkembangan media digital juga membawa tantangan baru seperti hoaks, cyberbullying, dan perdebatan politik yang berlebihan di media sosial. Tidak sedikit masyarakat yang masih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA PASCA-REFORMASI : PERSPEKTIF GENERASI Z TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI ERA DIGITAL

Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menyaring informasi menjadi hal yang sangat penting di era digital sekarang. Pada akhirnya, perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan memperluas partisipasi politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, penggunaan media digital yang tidak bijak juga dapat menimbulkan konflik dan penyebaran informasi yang salah. Generasi Z memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan bagaimana ruang digital digunakan dalam kehidupan politik pada masa mendatang. Sikap kritis dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, demokrasi Indonesia diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih sehat dan terbuka

REFERENSI

- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2015). *Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Kencana.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media komunikasi politik*. IRCiSoD.
- Indrajit, E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurnia, N. (2019). *Literasi digital keluarga: Teori dan praktik pendampingan penggunaan media digital di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Noer, D. (2016). *Pengantar ke pemikiran politik*. Jakarta: Rajawali Pers.